BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor	:	107/PM.02.00/K.KN-03/11/2023	27 November 2023
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Menindaklanjuti Intruksi Bawaslu RI	

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten ketapang

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Dalam rangka Menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Intruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan melekat Tahapan Kampanye DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
b. Melakukan Pengawasan terkait dengan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ketapang Nomor 199 Tahun 2023 dan Surat Edaran Bupati ketapang Nomor : P/0979/BKBP-C.200.2.6/XI/2023;
c. Melakukan Pengawasan terkait dengan Pelaksana Kampanye DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan Ke KPU, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
d. Menyampaikan hasil Pengawasan Kampanye Formulir Form A ke Bawaslu Kabupaten Ketapang setiap hari Pukul 17.00 WIB;
e. Maksimalkan keberadaan Posko pengaduan atau pelaporan masyarakat dengan memposting Posko tersebut ke media sosial Panwaslu Kecamatan sebagai alat sosialisasi.
f. Akan ada aplilasi Siwaskam yang harus diisi oleh Panwascam dan PKD.
g. Aplikasi tersebut berbasis Android yang di download di Playstore yang selanjutnya akan kami kirimkan link ke seluruh Panwascam dan PKD.
h. Kami akan menghimpun e-mail Panwascam dan PKD untuk didaftarakan dalam aplikasi tersebut dan pastikan semua email aktif.
i. Setiap hari harus diisi di Siwaskam oleh masing-masing Panwaslu kecamatan dan PKD
j. Selain mengisi Siwaskam Panwaslu Kecamatan tetap mengisi Alat Kerja Pengawasan Kampanye secara manual.
k. Form A pengawasan Manual tetap harus di buat mulai tanggal 28 November s/d 10 Februari 2024.
l. Rekap Form A dibuat setiap minggu sesuai jumlah Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di masing-masing wilayah kerja Panwaslu Kecamatan.
m. Pastikan Kelengkapan Alat Kerja Pengawasan termasuk Surat Tugas Pengawasan.
n. Form A dibuat serinci dan sedetail mungkin, lengkapi dengan video dan foto jenis pelanggarannya dan kerjakan segera jangan di tunda-tunda. karna Form A tersebut adalah produk hukum dan alat bukti di Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG KETUA

MOH DOFIR

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip